

**PELAKSANAAN ALIH MEDIA DALAM TAHAPAN SURAT UKUR
ELEKTRONIK MENJADI SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

NATADIO RAKHEL KASMANA

NIT. 21303699

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The achievement of Electronic Certificate (e-Certificate) implementation, particularly at the Pre SU-el stage, reached only 1.25% of the total active land survey documents as of January 2025. Moreover, among the 365 villages/urban neighborhoods administratively managed by the Bogor Regency Land Office I, none has yet met the criteria to be considered a complete village/urban neighborhood. Based on this issue, the objectives of this research are: (1) to describe the implementation process of the SU-el stages; and (2) to identify the challenges and proposed solutions in implementing each stage of the SU-el process.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collected consists of primary data, including information on the implementation of SU-el, challenges in its implementation, and possible solutions. Secondary data includes regulations related to electronic certificates, particularly SU-el, as well as summaries of SU-el data and records on the quality of spatial and textual data. Primary data was collected through interviews, while secondary data was obtained through document studies. The data analysis was conducted using a qualitative approach, with the findings presented through data reduction and categorization.

The results of this study conclude that: (1) The implementation of the SU-el process is divided into three stages, namely Pre SU-el, Quality Control, and SU-el Validation; and (2) Each stage of the SU-el implementation faces challenges, which can be categorized into internal and external constraints, along with corresponding solutions for each identified issue.

Keywords : Electronic survey letter, Implementation, Constraint, Solutions.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Konsep Alih Media	12
2. Sertipikat Elektronik	13
3. Pelaksanaan tahapan Pra SU-el.....	15
4. Kendala	17
5. Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).....	18
6. Validasi Tanah Kita (SITATA)	19
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Penetapan dan Jumlah Informan	25

D. Definisi Operasional.....	26
E. Jenis,Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data	29
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	31
A. Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor	31
B. Kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.....	32
BAB V ALIH MEDIA SURAT UKUR ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I.....	39
A. Implementasi Alih Media Surat Ukur Elektronik.....	39
B. Kondisi Data Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I	50
C. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur Elektronik.....	55
1. Sumber Daya Manusia.....	55
2. Sarana Dan Prasarana	57
BAB VI KENDALA DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR ELEKTRONIK.....	59
A. Kendala Dalam Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.....	59
1. Kendala Internal Alih Media Surat Ukur Elektronik	60
2. Kendala Eksternal Alih Media Surat Ukur Elektronik.....	65
B. Solusi Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.....	68
1. Solusi Kendala Internal Alih Media Surat Ukur Elektronik	68
2. Solusi Kendala Eksternal Alih Media Surat Ukur Elektronik	70
BAB VII PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat memiliki dampak terhadap dunia kerja dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pemerintahan. Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi di berbagai aspek, termasuk dalam pelayanan administrasi pemerintahan (Herawza Fachri dkk., 2023). Salah satunya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang disebut dengan *e-government*, SPBE merupakan transformasi yang menggunakan teknologi berbasis digital yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah (Arief & Abbas, 2021). SPBE menekankan pada pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan dapat menjadi lebih transparan dan dapat meningkatkan efisiensi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sudah melaksanakan SPBE di dalamnya.

Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan layanan yang berbasis digital. Secara nasional terdapat empat jenis pelayanan elektronik yang telah diterapkan yaitu: Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pemeriksaan Sertipikat Tanah, Surat Informasi Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Hak Tanggungan Elektronik (Mujiburohman, 2021). Keempat jenis layanan sudah menerapkan layanan elektronik. Perkembangan layanan elektronik yang dilakukan Kementerian ATR/BPN guna mendukung kegiatan pendaftaran tanah yang akan menuju ke sistem yang berbasis elektronik seperti yang telah dilaksanakan di beberapa negara.

Sistem pendaftaran tanah di beberapa negara mengalami modernisasi dalam pembuatan sertipikat elektronik seperti Malaysia dengan sebutan *Sistem Computerised Land Registration System (CLRS)* dan *Electronic Land Administration System (ELAS)*, Singapura disebut *STARS eLodgment*,

Australia dengan sebutan *National Electronic Conveyancing System (NECS)* (Mujiburohman, 2021).

Perubahan menjadi sertipikat elektronik merupakan langkah yang tepat bagi Kementerian ATR/BPN untuk menjawab dari tantangan zaman, dengan begitu pelayanan akan efisien dan menghindari pemalsuan serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Perubahan menjadi sertipikat elektronik telah diatur mengenai pelaksanaannya yaitu dengan diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Aturan tersebut menjelaskan pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan melalui sistem elektronik meliputi: (1) pendaftaran tanah untuk pertama kali; (2) pemeliharaan data pendaftaran tanah; (3) pencatatan perubahan data dan informasi; dan (4) alih media. Bentuk peralihan yang berawal dari analog menuju elektronik merupakan suatu dokumen yang terdiri dari lembaran-lembaran blangko dan kertas yang dijahit menggunakan benang yang berisikan data yuridis dan data fisik yang memiliki korelasi dengan bidang tanah tersebut (Herawza Fachri dkk., 2023) sedangkan untuk sertipikat elektronik terdiri dari satu lembar kertas tanpa ada jahitan yang membuat lebih efisien dan transparansi. Maka dari itu Kantor Pertanahan memulai untuk menerapkan sertipikat elektronik (Mujiburohman, 2021)

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang sudah menerapkan penerbitan sertipikat elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dalam pelaksanaan sertipikat elektronik menurut Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik Versi 1.0 dan tata cara kerja verifikasi buku tanah dan surat ukur elektronik 2024 terdapat kegiatan alih media yaitu verifikasi dan validasi Pra Surat Ukur Elektronik (Pra SU-el) menjadi surat ukur elektronik dan Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el) menjadi buku

tanah elektronik. Penelitian ini akan terfokus pada tahapan Pra SU-el dan kendala yang dihadapi meliputi kualitas data, karena kualitas data merupakan hal penting dalam penerapan sertipikat elektronik (Suhattanto dkk., 2021)

Penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan didukung oleh kualitas data pertanahan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Kualitas data dalam pembuatan sertipikat elektronik tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain jumlah bidang tanah yang telah terdaftar, validitas dan kelengkapan data fisik maupun yuridis, dan kesesuaian data hasil alih media (warkah, buku tanah, dan surat ukur) antara yang tercatat di Kantor Pertanahan dengan kondisi aktual di lapangan(Suhattanto dkk., 2021). Sumber daya manusia harus yang berkompeten dan memahami dari pelaksanaan surat ukur elektronik(SU-el). Sarana Prasarana juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan Pra SU-el karena dalam setiap kegiatannya menggunakan laptop. Penerapan sertipikat elektronik akan terhambat jika terdapat bidang yang belum terdaftar ataupun belum terpetakan, oleh karena itu Kantor Pertanahan harus memastikan validasi data bidang tanah di wilayahnya masing-masing (Elora, 2024). Validasi data elektronik khususnya basis data surat ukur akan memiliki kendala jika data spasial yang dimiliki Kantor Pertanahan berbeda dengan keadaan yang terjadi dilapangan (Panamuan dkk., 2023). Tantangan dalam menerapkan sertipikat elektronik disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas yang dimiliki di lingkungan Kantor Pertanahan serta merubah pandangan masyarakat agar lebih percaya terhadap sertipikat elektronik(Huda & Wandebori, 2021).

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dalam penerapan sertipikat elektronik memiliki angka yang tidak seimbang antara surat ukur yang belum dialihmediakan dengan data Pra SU-el yang sudah dialihmediakan. Adapun data Pra SU-el dari Bulan Agustus 2024 hingga Januari 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Data Pra Surat Ukur Elektronik

Bulan , Tahun	Jumlah Persil	Jumlah Surat Ukur	Pra SU-el	% Pra SU-el
Agustus, 2024	1.243.395	1.185.339	4.376	0,37 %
September, 2024	1.250.761	1.188.959	7.342	0,62 %
Oktober, 2024	1.254.707	1.199.030	11.319	0,94 %
November, 2024	1.260.244	1.211.470	13.162	1,09 %
Desember, 2024	1.262.906	1.213.995	14.161	1,17 %
Januari, 2025	1.266.751	1.216.449	15.180	1,25 %

Sumber: Aplikasi Kementerian ATR/BPN, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, capaian penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang paling tinggi pada Bulan Januari mencapai 1,25%. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang terdiri dari 364 desa. Dari 364 desa tersebut, belum ada potensi untuk menjadi desa lengkap. Tabel 1 menunjukkan capaian Pra SU-el masih rendah. Di sisi lain, lokasinya yang strategis menjadikan Kabupaten Bogor sebagai pusat aktivitas yang dinamis dan terus berkembang, dengan kemudahan infrastruktur, komunikasi dan telekomunikasi sehingga Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten yang diminati untuk berinvestasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan tanah merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Peningkatan kebutuhan tanah akan terus terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dapat memperbaiki data tekstual dan spasial agar kualitas data pertanahan di wilayah tersebut semakin baik. Dengan memperbaiki data pertanahan akan membuat pelaksanaan SU-el menuju sertipikat elektronik menjadi cepat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Alih Media Dalam Tahapan Surat Ukur Elektronik Menjadi Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana implementasi alih media dalam tahapan Surat Ukur Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi alih media pada tahapan Surat Ukur Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a) Mendeskripsikan implementasi dalam tahapan Surat Ukur Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
 - b) Mendeskripsikan kendala dan solusi yang terjadi dalam tahapan Surat Ukur Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
2. Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara akademis ataupun praktis, yaitu:
 - a) Kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai alih media (tahapan Surat Ukur Elektronik) khususnya terkait implementasi dalam Surat Ukur Elektronik yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
 - b) Kegunaan praktis adalah menjadikan bahan masukan mengenai kendala dan solusi mengenai pelaksanaan alih media dalam tahapan Surat Ukur Elektronik untuk Kementerian ATR/BPN dimasa yang akan datang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan alih media Surat Ukur Elektronik (SU-el) menunjukkan perbedaan pada tahapan Pra SU-el dengan tata cara verifikasi buku tanah dan surat ukur elektronik 2024. Proses ini melibatkan 17 orang. Terkait sarana prasarana sudah baik. Kantor Pertanahan hanya berhasil memetakan 39,20% luas persil, dengan capaian Pra SU-el sebanyak 16.589 bidang tanah. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas data spasial dan data tekstual untuk mendukung tahapan alih media SU-el.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media surat ukur elektronik dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Kendala internal yang dihadapi baik persil dan tekstual yaitu : 1) Tumpang Tindih antara bidang tanah; 2) Beda bentuk dan beda luas bidang tanah; 3) Bidang tanah yang sudah NIBEL tetapi tidak sesuai pada posisi nya; 4) Bidang tanah kluster 4 (K4); 5) terdapat dua nomor identifikasi bidang yang sama dalam satu desa; 6) hilangnya arsip surat ukur. Kendala eksternal yaitu : 1) Terdapat pihak lain selain tim alih media yang masuk kedalam ruangan alih media; 2) Komunikasi dalam hal aksesibilitas terkait akun KKP Web dan SITATA; 3) Sistem KKP Web dan SITATA yang error
3. Solusi terhadap kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media surat ukur elektronik. Berikut solusi untuk kendala internal yaitu : 1) Perbaikan bidang tanah; 2) Perbaikan bidang tanah NIBEL; 3) Peningkatan Kualitas Data Spasial; 4) Pengecekan riwayat bidang tanah. Solusi untuk kendala eksternal yaitu : 1) Koordinasi antara pihak internal Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; 2) Pembuatan akun untuk tim alih media surat ukur elektronik; 3) Melakukan pelaporan kepada PUSDATIN.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I perlu meningkatkan kualitas data, sumber daya manusia, dan sistem pelaksanaan secara berkelanjutan. Sehingga dalam penerapan sertipikat elektronik pada tahapan surat ukur elektronik dan berjalan dengan lancar dan efisien.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji dalam hal kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem pelaksanaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dalam menghadapi transformasi digital melalui alih media.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro* (Vol. 8, Nomor 1). <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor* 2025. <https://bogorkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/c80ae8a6186ce25a19dd64e5/kabupaten-bogor-dalam-angka-2025.html>
- Basir, A., suhartati, & Nila Kusuma Dewi, M. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) Sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(1), 2023.
- Elora, D. (2024). Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat Elektronik. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13834686>
- Fatmawati, E. (2022). *Alih Media Digital Dalam Kegiatan Pelestaria Informasi*. <https://www.rjfahuinib.org/index.php/almaarif/>
- Haryani, D., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. *Jurnal Perspektif*, 3(4), 687–698.
- Haryono, E. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. <https://www.ejournal.iaiamc.ac.id/index.php/annuur/article/view/301/204>
- Herawza Fachri, M., Surial, M., Elyunusi, Z., Chandra, I., & Pratiwi, A. A. (2023). Efisiensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah. 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/329351816>

- Huda, N., & Wandebori, H. (2021). Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital. *Jurnal Kebijakan Pertanahan* |, 1(1), 17–28. <https://jurnalmarcapada.stpn.ac.id>
- Inayati, T., & Wahyuningsih, D. (2018). Pendekatan Theory of Constraint (TOC) dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Produksi (Studi ada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Tjoekir Diwek Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur). Dalam *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)* (Vol. 1, Nomor 2). <https://doi.org/10.56858/jmpkn.v1i2.10>
- Laksono, R. (2017). *Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Proses Alih Media Arsip Statis*. 1(1), 47–60. <https://doi.org/10.22146/diplomatika.28271>
- Mujiburohman, D. (2021). *Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik*. 7(1), 57–67. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Muryono, S. (2012). Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Pertanahan Berbasis Web Di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. *Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor*, 7.
- Panamuan, O. B., Syafei, M., & Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, K. (2023). Penerapan Validasi Sertifikat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya Menuju Pelayanan Elektronik. *Tanjungpura Journal of Law*, 2(1), 181–200. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan
- Pendaftaran Tanah Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik Versi 1.0 Nomor 3-JUKNIS-HR.02/III/2024
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis 300.UK.01.03/XII/2023
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta ,CV.

- Suhattanto, M., Aries Mujiburohman, D., Sarjita, & Sukayadi. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11>
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). *Analisis Data Dan Pengecekan Keabsahan Data*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/3w6qs>
- Syadilla Alifia, & Abiel Nathanael. (2025). *Kekuatan Hukum Hasil Alih Media Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Medan*. 12. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025>
- Syamsur, S., Madihong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Tata Cara Kerja Verifikasi Buku Tanah dan Surat Ukur Elektronik 2024
- Wahidmurni, M. P. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>
- Widiyantoro, S., I.G. Nyoman Guntur, Nur Rahmanto, & Dwi Wahyuningrum. (2022). Tantangan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik Di Kota dan Kabupaten Magelang. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 97–106. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7452>
- Yuliani, W. (2018). *Quanta Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. 2(2). <https://doi.org/10.22460/q.v2i1p21-30.642>
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*, 80, 1–23.